

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN PUNGLI
(PUNGUTAN LIAR) DI SMP NEGERI 24 MEDAN**

Kevin Andreas Halomoan Tambunan¹, Jessi Aprilia Silaban², Putri Paulina Sembiring³, Philip Marchello Hasonangan Sinaga⁴, Robintang Lumban Batu⁵
Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Published Mei 31, 2024

Kata Kunci:

Pungutan Liar, Pendidikan Anti Korupsi, Upaya Pencegahan Korupsi.

ABSTRAK

Pengumpulan liar atau pungutan liar adalah praktik meminta bayaran yang tidak sesuai dengan peraturan, sering dianggap sebagai pemerasan, penipuan, atau korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, aspek mental, ekonomi, budaya organisasi, sumber daya manusia terbatas, dan pengawasan yang lemah. Pungutan liar diatur secara jelas dalam KUHP, namun tindakan pemerasan, penipuan, dan pungutan liar merupakan tindak pidana yang saling terkait. Penelitian ini membahas tentang pungli di sekolah, termasuk definisi, faktor-faktor penyebab, dampak, dan strategi pemberantasan. Penelitian ini juga membahas tentang peran dan tanggung jawab pelaksana layanan, pengawas, serta masyarakat dalam mengatasi pungli di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memahami lebih jauh tentang pungli di sekolah dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kejuruan di sekolah.

1. PENDAHULUAN

Pungutan liar adalah tindakan meminta pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan, sering dianggap sebagai pemerasan, penipuan, atau korupsi. Faktor pendorong korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, aspek mental, ekonomi, budaya organisasi, sumber daya manusia terbatas, dan pengawasan yang lemah. Pungutan liar tidak diatur secara jelas dalam KUHP, namun tindakan pemerasan, penipuan, dan pungutan liar merupakan tindak pidana yang saling terkait.

Pungli (pemerasan) adalah tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Tindak pidana ini harus diwaspadai oleh aparat sipil negara, karena ancaman hukumnya cukup berat. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan. Seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi.

Belakangan ini, pungutan liar ke sekolah dengan rezim kerja berbeda sudah menjadi rahasia umum dan sulit dicegah karena melibatkan kelompok kepentingan lembaga pendidikan. Padahal SD dan SMP sudah mempunyai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011. Alasanyang sering dijadikan kedok untuk melakukan penyimpanganadalah “peningkatan mutu, peningkatan mutu sekolah

fasilitas (sarpras), perjalanan belajar dan sebagainya”, dan hal ini mengacu pada komite sekolah sebagai sarana pemerataan kegiatan. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi adalah perbuatan yang sama, dimana keduanya perbuatan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, melanggar hukum. (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2011, 2011)

Contoh pungli yang sering terjadi meliputi pelayanan pengurusan surat tanah yang seharusnya gratis, namun dikenakan biaya, kebiasaan membayar biaya parkir meskipun sudah dibayarkan sebelumnya, dan titip dalam pengurusan SIM dan surat lain yang dianggap wajar oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan penggelapan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 317 Tahun 1999 dan dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2001.

Pada tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Lembaga Kliring Pembayaran Ilegal yang didukung dengan Surat Edaran Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghapusan Biaya Kegiatan Ilegal (Penegakan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintah). Menurut pendekatan legislasi, aturan diciptakan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 H PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa “biaya sekolah tidak berkaitan dengan syarat akademik penerimaan siswa, evaluasi kinerja siswa dan/atau kelulusan siswa satuan pendidikan” Artinya biaya sekolah tidak dapat dibayarkan pada saat penerimaan siswa baru”. (2016, perpres no 87, 2016)

Dengan terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016, diharapkan dapat memberantas kasus-kasus pemerasan yang sering terjadi di masyarakat, yang terutama ditujukan kepada pejabat aparatur negara dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya likuidasi yang tepat sasaran, terpadu, efisien dan efektif sehingga mempunyai efek preventif terhadap pelaku pungli.

Sekolah merupakan miniatur dari realitas yang lebih besar, dan terlebih lagi kondisi pendidikan di suatu negara dapat mencerminkan kondisi negara tersebut. Dalam proses pengenalan pendidikan formal yaitu pada jenjang pendidikan menengah, Ki Hajar Dewantara (bapak pendidikan Indonesia) memandang bahwa pendidikan perilaku menengah atau SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan taman bagi orang dewasa, dimana pembelajaran harus menekankan pada karakter.

Berbagai macam tindakan pungutan dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan baik yang berdasarkan aturan (resmi) tertentu maupun tidak (liar), dan terjadi di lingkup sekolah negeri ataupun swasta. Pada lingkup sekolah swasta yang kegiatan penyelenggaraan pendidikannya dikelola oleh Yayasan-yayasan tertentu, berbagai aturan dan kebijakan dapat diciptakan untuk menjadi media pemungutan uang. (Junaedi, 2022)

Pungli di sekolah dapat berupa berbagai bentuk, seperti uang pendaftaran, uang komite, uang OSIS, uang ekstrakurikuler, uang ujian, uang daftar ulang, uang study tour, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang perpustakaan, uang bangunan, uang bantuan insidental, uang foto, uang perpisahan, uang sumbangan pergantian Kepsek, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan pungli di sekolah meliputi ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan, kurangnya integritas pelaksana layanan, kurangnya pengawasan dari atasan serta berbagai pengawas internal, dan kebiasaan pelaksana serta pengguna layanan.

Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji lebih lanjut tentang pungli di sekolah, termasuk definisi, faktor-faktor penyebab, dampak, dan strategi pemberantasan. Kita juga akan membahas tentang peran dan tanggung jawab pelaksana layanan, pengawas, serta

masyarakat dalam mengatasi pungli di sekolah. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih jauh tentang pungli di sekolah dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kejujuran di sekolah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memiliki pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, serta analisis dari berbagai artikel dan literatur lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 24 Medan, yang terletak di Jalan Metal, Kelurahan Krakatau Ujung, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah salah satu guru yang berfungsi sebagai wali kelas bagi kelas 8. Penulis berfokus pada analisis data yang terfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi, dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 24 Medan Untuk mencegah tindakan pungli (pungutan liar). Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 24 Medan Untuk mencegah tindakan pungli (pungutan liar), serta bagaimana guru dan siswa berperan dalam upaya tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Kurikulum Pendidikan Anti-Korupsi dan pungli

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Inkiriwang, 2020)

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Arifiati, 2022)

Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan pungli yang dapat dipilih yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri.

1) Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri

Kajian antikorupsi dan pungli diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, sama seperti kajian lainnya. Dalam hal ini, guru bidang pendidikan antikorupsi harus menyiapkan pedoman pengajaran (GBPP), satuan pelajaran (SP), rencana pembelajaran (RP), metodologi pengajaran dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran harus ada dalam rencana pembelajaran yang terstruktur..

2) Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran

Penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi juga dapat

diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalui mata pelajarannya. Nilai-nilai antikorupsi dapat diperkenalkan melalui beberapa tema atau subtema yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam model seperti ini, semua guru secara eksklusif adalah pengajar pendidikan antikorupsi..

3) Model di Luar Pembelajaran

Pengenalan nilai-nilai antikorupsi dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan santai. Penanaman nilai dengan model ini mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui kegiatan berdiskusi dan mendalami nilai-nilai kehidupan. Model ini dapat diterapkan oleh guru sekolah bersangkutan yang mempunyai tugas atau dipercayakan kepada organisasi di luar sekolah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..

4) Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah

Nilai-nilai antikorupsi juga dapat ditanamkan dalam seluruh kegiatan dan suasana sekolah dengan cara digalakkan. Budidaya menciptakan pembiasaan. Untuk meningkatkan budaya anti korupsi, sekolah harus merencanakan kegiatan budaya dan promosi. Membiasakannya adalah alat pembelajaran. Bagi anak kecil, pembiasaan sangatlah penting. Karena dengan latihan, tindakan pada akhirnya menjadi milik anak. Tata krama yang baik juga membentuk karakter seseorang yang berkepribadian baik. Sebaliknya kebiasaan buruk membentuk karakter seseorang yang berkepribadian buruk (Djamarah, 2002: 72). Berdasarkan kebiasaan tersebut, anak terbiasa menaati dan menaati peraturan di sekolah dan masyarakat..

5) Model Gabungan

Model blended artinya menggunakan kombinasi model pembelajaran terpadu dan eksternal. Penanaman nilai melalui induksi formal diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Model ini dapat diterapkan baik dalam kerja kelompok guru maupun bekerjasama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat dan dapat bahkan harus belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswanya. Anak mengetahui nilai-nilai kehidupan untuk mengubahnya melalui kegiatan yang terencana dan informatif serta dikuatkan oleh pengalaman.

Adapun metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebaiknya menggunakan cara yang demokratis, pencarian bersama, aktivitas bersama, menggunakan metode keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, live in serta melakukan klarifikasi nilai.

1) Metode demokratis

Metode ini menekankan pada pelaksanaan bersama antara siswa dan guru. Penelitian bersama lebih berorientasi pada pembahasan permasalahan nyata masyarakat, dimana dari proses tersebut diharapkan muncul sikap berpikir yang logis, analitis, sistematis, argumentatif, sehingga permasalahan yang dibicarakan bersama menjadi nilai-nilai kehidupan. Metode ini meminta siswa untuk aktif mencari dan menemukan kesamaan permasalahan. Dengan menemukan, mengkritik dan menghadapi permasalahan, anak diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupannya.

2) Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan pada pelaksanaan bersama antara siswa dan guru. Penelusuran bersama lebih berorientasi pada pembahasan permasalahan nyata masyarakat, dimana proses ini diharapkan dapat memunculkan sikap berpikir yang logis, analitis, sistematis, argumentatif, sehingga dapat diperoleh nilai-nilai kehidupan dari permasalahan yang ditangani bersama. Metode ini meminta siswa untuk aktif mencari dan menemukan topik yang menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan, mengkritik dan menghadapi

permasalahan, anak diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupannya.

3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Metode ini menekankan pada suatu proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru memberikan topik dan anak-anak dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses berikut. Anak melakukan observasi, mendiskusikan analisis dan memutuskan proses tindakannya. Metode ini menumbuhkan kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerjasama, kejujuran dan semangat juang pada anak.

4) Metode keteladanan

Dalam dunia pendidikan, kita dapat melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan anak-anak tanpa melakukan filterisasi. Proses pembentukan kepribadian anak diawali dengan memandang sosok yang ingin ditirunya. Guru dapat menjadi idola dan teladan bagi anak. Guru dapat menggunakan keteladanannya untuk membimbing anak mengembangkan sikap yang kuat. Kesesuaian perkataan dan perbuatan guru sangat penting bagi anak, dan jika terjadi pertentangan antara perkataan dan perbuatan guru maka tingkah laku anak juga salah. Dalam hal ini diperlukan keikhlasan, ketabahan dan konsistensi dalam hidup dari para guru. Pembinaan nilai-nilai antikorupsi pada anak melalui proses keteladanan pada awalnya dilakukan dengan memberi keteladanan, namun anak harus diberikan pemahaman mengapa hal tersebut dilakukan (Sanjaya, 2006: 179). Misalnya, guru harus menjelaskan mengapa kita tidak boleh melakukan korupsi; menjelaskan bahaya korupsi atau mengapa kita harus jujur dan tidak menyontek saat ujian. Hal ini diperlukan agar sikap-sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh keyakinan akan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

5) Metode Live In

Metode Live in dirancang untuk anak-anak agar mereka dapat merasakan hidup bersama orang lain dalam situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pengalaman langsung, anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda-beda baik dari segi cara berpikir, tantangan, permasalahan dan nilai-nilai kehidupan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala. Dengan demikian, anak didorong untuk mensyukuri kehidupannya yang jauh lebih baik dibandingkan orang lain, serta mengembangkan toleransi dan sikap sosial yang lebih tinggi dalam hidup bersama. Anak-anak harus dibimbing untuk merefleksikan pengalaman ini baik secara rasional, intelektual maupun dari sudut pandang spiritual batin. Harus dipastikan bahwa anak tidak bereaksi berlebihan terhadap pengalaman ini, namun harus wajar dan seimbang..6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Latar belakang sosial, pendidikan dan pengalaman dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kehidupan. Adanya perbedaan pandangan tentang kehidupan di masyarakat membuat anak bingung. Apabila kebingungan ini tidak dapat diungkapkan dengan baik dan tidak mendapat pertolongan yang baik maka ia akan mengalami penyimpangan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan proses klarifikasi nilai atau klarifikasi nilai melalui dialog afektif berupa sharing atau diskusi yang mendalam dan intens. Teknik klarifikasi nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran yang membantu siswa menemukan dan menentukan nilai yang dianggap baik ketika menghadapi suatu masalah dengan menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan ditetapkan. pada siswa. Dalam pembelajaran nilai-nilai atau sikap, termasuk pembelajaran antikorupsi, kelemahan yang umum terjadi adalah pembelajaran tersebut dilakukan langsung oleh guru, artinya guru memperkenalkan nilai-nilai yang dianggapnya baik,

tanpa memperhatikan nilai-nilai tersebut. . yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya sering muncul konflik atau pertentangan dalam diri siswa, yang disebabkan oleh pertentangan antara nilai-nilai lama yang dibentuk dengan nilai-nilai baru yang dianjurkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam mendamaikan nilai-nilai lama dan baru. (Zuber, 2018)

Membuat konten edukasi yang menarik guna tentang bahaya dari pungli

Menurut narasumber yang kami wawancarai yaitu ibu Dina Marlina S.H selaku guru ppkn di SMP Negeri 24 Medan mengatakan bahwa membuat dan menayangkan konten edukasi yang menekankan pada pentingnya kejujuran . Dengan cara ini, siswa akan lebih memahami dan lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan pungli.

Untuk membuat konten edukasi yang efektif, SMP Negeri 24 Medan dapat menggunakan berbagai strategi. Mereka dapat membuat video atau film pendidikan yang menampilkan konsekuensi negatif dari tindakan pungli dan pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Contohnya, video tersebut dapat menampilkan seorang siswa yang melakukan tindakan pungli dan kemudian mengalami konsekuensi negatif seperti hilangnya kepercayaan dan reputasi yang rusak.

SMP Negeri 24 Medan juga pernah membuat poster atau bahan visual yang menampilkan pesan-pesan tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Poster tersebut dapat menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan konsekuensi negatif dari tindakan pungli, serta pesan-pesan yang menekankan pada pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Dalam beberapa kesempatan, SMP Negeri 24 Medan juga membuat drama atau skenario yang menampilkan konflik dan solusi yang terkait dengan tindakan pungli. Contohnya, drama tersebut dapat menampilkan seorang siswa yang melakukan tindakan pungli dan kemudian harus menghadapi konsekuensi negatif, serta menampilkan solusi yang terkait dengan kejujuran dan etika dalam bertransaksi.

Selain itu, SMP Negeri 24 Medan juga dapat membuat cerita atau dongeng yang menampilkan nilai-nilai kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Cerita tersebut dapat menampilkan seorang siswa yang melakukan kejujuran dan etika dalam bertransaksi dan kemudian mendapatkan hasil yang positif, serta menampilkan konsekuensi negatif dari tindakan pungli. siswa akan lebih memahami dan lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan pungli. Selain itu,

Selain itu, SMP Negeri 24 Medan juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kejujuran dan etika dalam bertransaksi, seperti membuat kompetisi atau lomba yang menampilkan tema-tema terkait dengan kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Contohnya, kompetisi tersebut dapat menampilkan siswa yang melakukan kejujuran dan etika dalam bertransaksi dan kemudian mendapatkan hadiah atau penghargaan. Dengan cara ini, siswa akan lebih memahami dan lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan pungli. Selain itu, SMP Negeri 24 Medan juga dapat membuat proyek atau tugas yang menampilkan nilai-nilai kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Proyek tersebut dapat menampilkan siswa yang melakukan kejujuran dan etika dalam bertransaksi dan kemudian mendapatkan hasil yang positif.

Pengembangan Budaya Kerja yang berintegritas dan transparan

Di SMP negeri 24 medan ada yang namanya budaya kerja yang berintegritas dan transparan. Seperti yang di katakan oleh narasumber kami yaitu ibu Dina Marlina S.H Mengembangkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Budaya ini dapat membantu mencegah terjadinya pungli dan meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam

bertransaksi. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan dan workshop yang fokus pada pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Selain itu, organisasi pendidikan juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya integritas dan transparansi, seperti diskusi dan debat yang membahas topik-topik terkait dengan kejujuran dan etika.

Dalam pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan, peran guru sangat penting. Guru dapat menjadi role model yang baik bagi siswa dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan etis dalam bertransaksi. Guru juga dapat membantu siswa memahami pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dan membantu siswa memahami konsep-konsep yang terkait dengan kejujuran dan etika.

Selain itu, pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan juga dapat dilakukan dengan mengadakan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan adalah transparan dan jujur, serta tidak terjadi korupsi atau pungli.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi, organisasi pendidikan juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Contohnya, organisasi pendidikan dapat mengadakan acara-acara yang membahas topik-topik terkait dengan kejujuran dan etika, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. (Hanun, 2023)

Dalam mengembangkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan, organisasi pendidikan juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat memperoleh bantuan dan dukungan yang lebih luas dalam mengembangkan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan.

Selain itu, pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan juga dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi. Contohnya, organisasi pendidikan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang membantu siswa memahami pentingnya kejujuran dan etika dalam bertransaksi, seperti simulasi transaksi yang meminta siswa untuk membuat keputusan yang jujur dan etis.

Dengan demikian, pengembangan budaya kerja organisasi yang berintegritas dan transparan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, organisasi pendidikan juga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan.

4. KESIMPULAN

Pungutan liar atau korupsi di sekolah adalah perilaku yang melanggar hukum dan berpotensi merusak sistem pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan pungli di sekolah meliputi ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan, kurangnya integritas pelaksana layanan, kurangnya pengawasan dari atasan serta berbagai pengawas internal, dan kebiasaan pelaksana serta pengguna layanan.

Pungli di sekolah dapat berupa berbagai bentuk, seperti uang pendaftaran, uang komite, uang OSIS, uang ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Untuk mengatasi pungli di sekolah, diperlukan upaya yang terpadu dan efektif. Salah satu cara adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dan pungli dalam kurikulum pendidikan. Model-model yang dapat dipilih untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan pungli meliputi model sebagai mata pelajaran tersendiri, model terintegrasi dalam semua mata pelajaran, model di luar pembelajaran, dan model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis data yang terfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi di SMP Negeri 24 Medan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 24 Medan Untuk mencegah tindakan pungli (pungutan liar). Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kejujuran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- 2016, perpres no 87. (2016). 7.
- Arifiati, R. F. (2022). Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak. *JURNAL EMPATHY*, 122-129.
- Hanun, H. (2023). HUBUNGAN BUDAYA KERJA DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI. *Jurnal Enersia Publika*,, 134-148.
- Inkiriwang, R. R. (2020). KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Lex Privatum*, 143-153.
- Junaedi, L. P. (2022). HEGEMONI PUNGUTAN LIAR PADA SALAH SATU YAYASAN PENDIDIKAN MENENGAHPERTAMA SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR. 9.
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2011. (2011). 6.
- Zuber, A. (2018). STRATEGI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN. *Journal of Development and Social Change*, 178-190.